

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan penduduk sebenarnya merupakan keseimbangan dinamis antara dua kekuatan yang menambah atau yang mengurangi jumlah penduduk. Perkembangan penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah bayi yang lahir tetapi secara bersamaan pula akan dikurangi oleh jumlah kematian yang dapat terjadi pada semua golongan umur. Dalam konteks spasial mobilitas penduduk juga berpengaruh terhadap perubahan dalam jumlah penduduk, dimana imigrasi akan menambah jumlah penduduk dan emigrasi akan mengurangi jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Jumlah penduduk yang besar bagi beberapa kalangan merupakan suatu hal positif karena dengan jumlah penduduk yang besar tersebut dapat dijadikan sebagai subjek pembangunan, perekonomian akan berkembang bila jumlah tenaga kerjanya banyak.

Namun disisi lain beberapa kalangan justru meragukan apakah jumlah penduduk yang besar adalah sebagai asset seperti yang dijelaskan sebelumnya, akan tetapi kebalikan dari hal tersebut bahwa penduduk merupakan beban bagi pembangunan. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan yang semakin lama semakin banyak pula seiring dengan perkembangan jumlah penduduk tersebut. Pandangan pesimis seperti ini di dukung oleh teori Malthus yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk menurut deret ukur sementara pertumbuhan bahan makanan menurut deret hitung. Simpulan dari pandangan pesimis ini adalah bukan kesejahteraan yang didapat tapi justru kemelaratan akan di temui bilamana jumlah penduduk tidak dikendalikan dengan baik. Permasalahan kependudukan telah menjadi masalah penting bagi pemerintah dan para pakar kependudukan di Indonesia (Sunaryanto, 2012). Dan kita ketahui juga bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk ke- empat terbesar di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat.

Pertumbuhan penduduk sebenarnya merupakan keseimbangan dinamis antara dua kekuatan yang menambah atau yang mengurangi jumlah penduduk.

Perkembangan penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah bayi yang lahir tetapi secara bersamaan pula akan dikurangi oleh jumlah kematian yang dapat terjadi pada semua golongan umur. Dalam konteks spasial mobilitas penduduk juga berpengaruh terhadap perubahan dalam jumlah penduduk, dimana imigrasi akan menambah jumlah penduduk dan emigrasi akan mengurangi jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Jumlah penduduk yang besar bagi beberapa kalangan merupakan suatu hal positif karena dengan jumlah penduduk yang besar tersebut dapat dijadikan sebagai subjek pembangunan, perekonomian akan berkembang bila jumlah tenaga kerjanya banyak.

Namun disisi lain beberapa kalangan justru meragukan apakah jumlah penduduk yang besar adalah sebagai asset seperti yang dijelaskan sebelumnya, akan tetapi kebalikan dari hal tersebut bahwa penduduk merupakan beban bagi pembangunan. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan yang semakin lama semakin banyak pula seiring dengan perkembangan jumlah penduduk tersebut. Pandangan pesimis seperti ini di dukung oleh teori Malthus yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk menurut deret ukur sementara pertumbuhan bahan makanan menurut deret hitung. Simpulan dari pandangan pesimis ini adalah bukan kesejahteraan yang didapat tapi justru kemelaratan akan di temui bilamana jumlah penduduk tidak dikendalikan dengan baik. Permasalahan kependudukan telah menjadi masalah penting bagi pemerintah dan para pakar kependudukan di Indonesia (Sunaryanto, 2012). Dan kita ketahui juga bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk ke- empat terbesar di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat.

Jika tidak diupayakan pengendalian penduduk secara serius, hal ini berimplikasi kepada beratnya beban pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama untuk menyediakan pelayanan dasar berupa pendidikan dan kesehatan. Upaya pemerintah mengendalikan laju pertumbuhan penduduk (LPP) telah tertuang di dalam RPJMN 2004 – 2009, yaitu dengan memberikan prioritas kepada kelompok masyarakat miskin tersebut dengan cara menurunkan angka kelahiran melalui Program Keluarga Berencana Nasional. Hal ini juga sesuai dengan Visi BKKBN

sebagai penyelenggara Keluarga Berencana Nasional dengan visinya yaitu Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.

Keberadaan program Keluarga Berencana (KB) merupakan usaha pemerintah untuk mencapai kesejahteraan keluarga dengan cara mengatur jumlah kelahiran melalui alat kontrasepsi seperti kondom, IUD dan alat kontrasepsi lainnya. Program Keluarga Berencana di Indonesia lebih banyak diarahkan untuk perempuan. Untuk peserta KB pria masih sangat rendah karena masih rendahnya informasi bagi pasangan suami istri tentang KB Pria selain itu juga berbagai kegiatan yang telah dilakukan banyak pada wanita saja. Dalam Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2010-2015 dijelaskan bahwa partisipasi pria menjadi salah satu indikator keberhasilan program KB dalam memberikan kontribusi yang nyata untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Partisipasi pria dalam KB adalah tanggung jawab pria dalam kesertaan ber-KB, serta berperilaku seksual yang sehat dan aman bagi dirinya, pasangan dan keluarganya. Bentuk partisipasi pria dalam KB dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penyediaan pelayanan keluarga berencana (KB) gratis bagi masyarakat. Selain itu, secara mikro kegiatan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga, karena dengan kecilnya jumlah anggota suatu keluarga maka keluarga tersebut diharapkan dapat meningkatkan gizi makanan, tingkat kesehatan, dan pendidikan anggota keluarganya. Kegiatan pelayanan KB di lapangan melibatkan dua kementerian/lembaga, yaitu BKKBN dan Kementerian Kesehatan. BKKBN bertanggung jawab menciptakan permintaan akan layanan KB yaitu dengan mengajak pasangan usia subur (PUS) untuk ber-KB dan menjaga PUS tersebut untuk terus aktif ber-KB melalui tenaga lini lapangan (Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Pengawas KB/PKB, Petugas Pembina KB Desa/PPKBD, dan Sub- PPKBD) dengan banyaknya penyuluh keluarga berencana

di lini terendah memiliki harapan sosialisasi tentang keluarga berencana ini dapat berjalan dengan baik dan bisa sampai informasinya kepada masyarakat Perkotaan ataupun masyarakat perdesaan di dalam salah satu program tersebut adalah berkaitan dengan bagaiman kesehatan bereproduksi bagi masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Kesehatan Reproduksi yang menjamin setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang bermutu, aman dan dapat dipertanggung jawabkan, dimana peraturan ini juga menjamin kesehatan perempuan dalam usia reproduksi sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat, berkualitas yang nantinya berdampak pada penurunan Angka Kematian Ibu. Didalam memberikan pelayanan Kesehatan Reproduksi ada dua tujuan yang akan dicapai, yaitu tujuan utama dan tujuan khusus.

Konsep Kesehatan Reproduksi menggunakan pendekatan siklus kehidupan perempuan (*life-cycle-approach*) atau pelayanan kesehatan reproduksi dilakukan sejak dari janin sampai liang kubur (*from womb to tomb*) atau biasa juga disebut dengan "*Continuum of care women cycle*". Kesehatan reproduksi menggunakan pendekatan sepanjang siklus kehidupan perempuan hal ini disebabkan status kesehatan perempuan semasa kanak-kanak dan remaja mempengaruhi kondisi kesehatan saat memasuki masa reproduksi yaitu saat hamil, bersalin, dan masa nifas. Hambatan sosial, budaya, dan ekonomi yang dialami sepanjang hidup perempuan merupakan akar masalah yang mendasar yang menyebabkan buruknya kesehatan perempuan saat hamil, bersalin, dan masa nifas. Tingkat pendidikan, kualitas dan kuantitas makanan, nilai dan sikap, sistem kesehatan yang tersedia dan bisa diakses, situasi ekonomi, serta kualitas hubungan seksualnya mempengaruhi perempuan dalam menjalankan masa reproduksinya.

Pengetahuan akan masa reproduksinya khususnya ibu-ibu nelayan baru sekedar pengetahuan umum saja biasanya hanya berkaitan dengan kesiapan pasangan suami istri dalam memperoleh keturunan padahal pengetahuan kesehatan reproduksi harus dipersiapkan dengan matang. Hal tersebut selaras dengan pengertian kesehatan reproduksi menurut BKKBN 1996 yang menjelaskan bahwa Kesehatan Reproduksi adalah suatu keadaan sehat mental, fisik dan kesejahteraan

sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan serta dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, spiritual yang memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Kurangnya keterlibatan ibu-ibu nelayan terhadap sosialisasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan yang mengatur hak reproduksi dan kesehatan reproduksi sehingga menimbul pemahaman masyarakat tentang nilai anak telah bergeser dari mengutamakan jumlah menjadi memperhatikan kualitas terutama pendidikan. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang menyebabkan banyak terjadinya peristiwa kelahiran di luar nikah akibat dari pergaulan bebas dan masih rendahnya kemauan masyarakat terhadap pendewasaan usia perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Tentang pokok-pokok perkawinan rendahnya kesadaran ibu-ibu nelayan terhadap pendewasaan usia perkawinan didorong oleh beberapa alasan seperti adat istiadat, ekonomi dan sosial budaya, serta masih rendahnya peserta KB aktif yang akan menyebabkan berbagai masalah kependudukan diharapkan partisipasi masyarakat dalam Program Keluarga Berencana di Kota dan di desa dapat memberikan dampak yang positif yaitu menurunkan angka kematian ibu dan anak disaat melahirkan, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, peningkatan kesejahteraan keluarga, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan mutu dan layanan KB, peningkatan sistem pengelolaan dan kapasitas SDM, pelaksanaan tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah berjalan lancar.

Bertitik tolak dari pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi dengan Partisipasi dalam Program Keluarga Berencana (KB) Pada Ibu-ibu nelayan di desa Sungaibuntu kecamatan pedes kabupaten Karawang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka masalah penelitian ini difokuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana Upaya Petugas lapanagan Keluarga Berencana (PLKB) dalam menumbukan minat pasangan usia Subur untuk mengikuti Program KB
2. Mengetahui Bagaimana Program layanan Keluarga Berencana (KB) yang di minati oleh pasangan Usia Subur
3. Menganalisi Bagaimana peranan PLKB dalam menigkatan Pengetahuan pasangan usia subur (PUS) pada kesehatan reproduksi

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Mengetahui bagaimana Upaya Petugas lapanagan Keluarga Berencana (PLKB) dalam menumbukan minat pasangan usia Subur untuk mengikuti Program KB
2. Mengetahui Bagaimana Program layanan Keluarga Berencana (KB) yang di minati oleh pasangan Usia Subur
3. Menganalisi Bagaimana peranan PLKB dalam menigkatan Pengetahuan pasangan usia subur (PUS) pada kesehatan reproduksi

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait sehingga hasilnya dapat menjadikan kualitas pembelajaran yang lebih baik.

1. Manfaat Teoretis

Secara umum, manfaat dari hasil penelitian ini adalah memberikan sumbangan ide untuk mengembangkan program Keluarga berencana di ibu-ibu nelayan sehingga dapat mewujudkan visi dari Program KB Nasional.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi masyarakat, khususnya suami tentang faktor yang

berhubungan dengan dukungan suami terhadap kepesertaan istri dalam program keluarga berencana (KB).

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi data dasar untuk penelitian selanjutnya, serta referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian sejenis